

Keterlibatan Media Massa Online (*New Media*) Dalam Pemberitaan Konflik Sosial

Widyaningtyas Virgo Kartika

Akademi Komunikasi Radya Binatama

Jl. Raya Janti No.3/47 Yogyakarta

(0274) 486868

Email : widya_berpijar@yahoo.co.id

ABSTRACT

Mass media involvement in reporting a social conflict event is an inevitability. It is due to the fact the conflict is a news value, despite of that other news value elements are proximity, actuality, factuality, human interest and popularity. Presenting news related to a conflict event by related mass media, it brings logical consequence per se towards the position or alignment of the mass media institution against the ongoing domain of the conflict. This article is the study result of the writer applying literature study method in analyzing the involvement of online mass media in reporting social conflict event. The writer writes that there are several interesting points occurred when online mass media reporting a social conflict. First, online mass media tends to prioritize actuality in delivering information to public despite of news accuracy (factuality). Second, actuality in delivering news to public will cause reporting news bias. Third, online mass media tends to perform alignment by becoming story teller of a social conflict and plays its role as conflict intensifier and conflict diminisher.

Keywords: Online mass media, social conflict, mass media alignment, reporting

ABSTRAK

Keterlibatan media massa dalam menceritakan sebuah peristiwa konflik sosial merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini dikarenakan konflik itu sendiri merupakan suatu nilai berita (news value), selain konflik unsur-unsur nilai berita lainnya adalah, kedekatan (proximity), aktualitas, faktualitas, human interest dan kepopuleran. Penyajian sebuah berita yang dilakukan oleh media massa terkait suatu peristiwa konflik, dengan sendirinya akan membawa konsekuensi logis terhadap posisi atau keberpihakan institusi media massa tersebut dalam ranah konflik yang terjadi, diikaji dengan menggunakan metode studi literatur dalam menganalisa keterlibatan media massa online dalam pemberitaan peristiwa konflik sosial. Menurut pendapat penulis ada beberapa hal menarik yang terjadi ketika media massa online memberitakan sebuah konflik sosial. Pertama media massa online cenderung mengutamakan kecepatan (aktualitas) penyampaian informasi kepada khalayak dibandingkan akurasi berita (faktualitas). Kedua, kecepatan penyampaian berita kepada khalayak akan menyebabkan terjadinya bias berita. Ketiga, media massa online cenderung akan melakukan keberpihakan dengan menjadi pencerita (story teller) sebuah konflik sosial dan akan memainkan peran baik mempertajam (intensifier) maupun meredakan konflik (diminisher).

Kata kunci : Media massa online, konflik sosial, keberpihakan media massa, berita

Pendahuluan

Pemakaian terminologi media baru atau *new media* sejatinya merupakan sebuah istilah lama yang telah digunakan sejak tahun 1960-an. Menurut definisi yang disusun oleh Liverouw dan Livingstone (McQuail, 2011: 42), media baru merupakan relasi antara teknologi informasi dan komunikasi dengan konteks sosial yang menyatukan tiga elemen yakni : (1) alat dan artefak teknologi; (2) aktivitas, praktik dan penggunaannya; (3) struktur, dan lembaga sosial yang terbentuk diseperti alat dan praktik tersebut.

Namun yang menjadi ciri pokok dari media baru yang membedakan dengan media lama adalah kesalingterhubungan, akses terhadap khalayak individu baik sebagai penerima maupun pengirim pesan, interaktif, kegunaannya yang beragam sebagai karakter yang terbuka dan sifatnya yang ada di mana-mana atau *delocatedness* (McQuail,2011:43).

Berangkat dari konsep tersebut, dapat dikatakan bahwa media massa *online* merupakan bagian dari media baru yang saat ini relatif massif diakses oleh khalayak dalam mencari sumber informasi atau berita. Hal ini

sebagaimana dikatakan oleh Sulzberger yang merupakan salah seorang eksekutif dari New York Times bahwa saat ini pengunjung laman NYTimes.com berjumlah 18 juta *hit* (kunjungan) setiap hari yang berarti 10 kali lipat lebih banyak dari jumlah eksemplar Koran New York Times yang terjual (Vivian John, 2008 : 3).

Hal yang relatif sama juga terjadi di Indonesia berdasarkan data dari Kementrian Komunikasi dan Informasi seperti yang dikutip dari <http://tekno.kompas.com/read/2016/10/24/15064727/2016.pengguna.internet.di.indonesia.capai.132.juta>. pada 24 Februari 2017, kompas.com menyatakan bahwa survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) mengungkap bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia kini telah terhubung ke internet. Survei yang dilakukan sepanjang 2016 itu menemukan bahwa 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet. Adapun total penduduk Indonesia sendiri sebanyak 256,2 juta orang. Hal ini mengindikasikan kenaikan 51,8 persen dibandingkan jumlah pengguna internet pada 2014 lalu. Survei yang

dilakukan APJII pada 2014 hanya ada 88 juta pengguna internet¹.

Berpijak dari data yang ada tersebut dapat dikatakan bahwa pengguna internet atau media *online* di Indonesia relatif banyak dan memiliki kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat atau khalayak pengguna media *online* di Indonesia relatif semakin masif dan menjadikan media *online* sebagai sumber referensi mereka dalam mencari informasi atau berita terkait peristiwa yang terjadi termasuk konflik sosial.

Pemberitaan terkait peristiwa konflik sosial melalui media massa *online* akan membawa beberapa dampak ikutannya. Sebagaimana menurut Andrew Arno dalam Prajarto (1993 : 1-2), *Pertama*, media massa *online* akan menjadi pencerita konflik tersebut (*story teller*). *Kedua* setelah menjadi pencerita konflik, media massa *online* akan menentukan kecenderungan perannya atau keberpihakkannya dalam bentuk; mempertajam konflik

(*intensifier*), meredakan konflik (*dimishier*) atau menjadi pihak yang mengambil posisi netral atau pihak ketiga (*third party*).

Berangkat dari konteks tersebut, penulis mencoba mengamati beberapa pemberitaan media massa *online* terkait dengan peristiwa konflik sosial. Salah satu peristiwa konflik sosial yang relatif aktual dan diberitakan secara masif baik oleh media massa cetak, televisi dan juga media massa *online* serta media sosial adalah peristiwa konflik yang bernuansa Suku, Agama dan Ras (SARA) yang terjadi di Kabupaten Tolikara Propinsi Papua pada saat sebagian besar masyarakat Indonesia tengah merayakan hari raya Idul Fitri atau tepatnya tanggal 17 Juli 2015.

Beberapa media massa *online* yang diamati oleh penulis antara lain, Kompas.com, MetroTVNews.com, VivaNews, JPPN dan Republika.com melakukan pemberitaan secara massif terkait peristiwa konflik sosial dalam yang menceritakan tentang kerusuhan antar warga pendatang dan warga asli yang berujung pada terbakarnya sejumlah kios dan sebuah rumah ibadah umat Islam.

¹ Berdasarkan hasil survei APJII yang dikutip dari <http://tekno.kompas.com/read/2016/10/24/15064727/2016.pengguna.internet.di.indonesia.capai.132.juta>. diakses pada 24 Februari 2017

Namun sayangnya menurut pengamatan penulis pemberitaan yang dilakukan oleh media massa online ini justru semakin mengaburkan persoalan atau realitas konflik sebenarnya dan justru semakin memperkeruh situasi yang berdampak kepada khalayak luas di luar kabupaten Tolikara. Ada beberapa hal yang menurut pengamatan penulis yang menarik untuk diulas, antara lain : (1) proses penyusunan dan penyampaian isi berita; (2) keberpihakan media dalam konflik sosial tersebut dan (3) peran media *online* dalam memberitakan peristiwa konflik dalam konteks masyarakat majemuk.

Metode penelitian

Studi ini menggunakan metode kualitatif dalam bentuk studi literatur. Studi literatur merupakan teknik analisis terhadap berbagai sumber informasi termasuk bahan cetak seperti buku, artikel, novel, Koran, media *online* dan sebagainya; sehingga studi literatur dapat dikatakan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Melalui studi literatur, para peneliti mempunyai

pendalaman yang lebih luas dan mendalam terhadap masalah yang hendak diteliti (Irawan, 2007:58).

Hasil dan Pembahasan

1. Bias Berita Dalam Pemberitaan Konflik Sosial Cenderung Mempertajam Konflik

Menurut pengamatan penulis terhadap beberapa media massa online yang memberitakan peristiwa konflik adalah sebuah kewajaran karena, konflik merupakan salah satu unsur nilai berita sebagaimana menurut Bruce D. Itule dan Douglas A. (Junaedi, 2007 : 22) yang menyatakan bahwa selain unsur 5W dan 1H ada hal yang mendasari untuk menjadikan sebuah peristiwa layak dipublikasikan, yakni peristiwa yang memiliki nilai berita (*news value*), antara lain, kedekatan (*proximity*), konflik, kebaruan dan *human interest*.

Meliput sebuah berita yang meliput peristiwa konflik pasti akan jauh lebih menarik perhatian khalayak dibandingkan dengan berita yang tidak mengandung unsur konflik. Hal ini seakan sudah menjadi semacam keharusan bagi sebuah media massa ketika hendak meliput sebuah peristiwa dan pernyataan "*A bad news is good*

news" seakan masih berlaku dalam hal peliputan sebuah berita (Junaedi, 2007 : 22).

Meskipun demikian sudah semestinya para jurnalis dan institusi media massa *online* dalam memberitakan sebuah peristiwa konflik menggunakan tipe liputan yang berimbang (*cover both side*) dan memberitakannya secara komprehensif, bukan malah sebaliknya hanya sekedar memberitakan sebuah peristiwa konflik tapi tidak melakukan peliputan dengan benar. Sebagai contoh berita yang dimuat oleh *Kompas.com* pada tanggal 17 Juli 2015 hanya memakai satu narasumber dari kepolisian, sebagaimana kutipan berita di bawah ini :

**Belasan Kios dan Rumah
Warga Hangus Dibakar Massa
Tak Dikenal**

JAYAPURA, KOMPAS.com — Belasan kios, rumah, dan sebuah mushala hangus dibakar massa di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Jumat (17/7/2015) pagi. Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua Kombes Patrige Renwarin yang dihubungi melalui telepon selulernya membenarkan kejadian ini. Menurut Patrige, dari laporan yang diperoleh dari Kapolres Tolikara, kejadian berlangsung

sekitar pukul 07.00 WIT. Saat itu, ratusan warga tiba-tiba berdatangan dari berbagai arah melempari mushala. Tak lama berselang, massa lalu membakar mushala dan beberapa rumah serta kios yang ada di sekitarnya.

Ratusan umat Muslim di Karubaga yang sedang melaksanakan shalat Id di Lapangan Koramil Tolikara terpaksa membubarkan diri karena takut menjadi sasaran amuk massa. "Mereka mencari perlindungan di Markas Koramil Tolikara dan Pos Yonif 756," ujar Patrige².

Hal ini sebenarnya sudah menunjukkan terjadinya bias pemberitaan yang disebabkan oleh tipe liputan yang dilakukan oleh jurnalis dan institusi media massa *online* tersebut. Hal ini dikarenakan media massa *online* tersebut hanya menggunakan tipe liputan *one-sided* dan tidak menggunakan tipe liputan dua sisi atau *both sided coverage* (Prajarto, 1993 :2).

Bayangkan untuk sebuah peristiwa konflik sosial sekrusial itu, media massa *online* tersebut dengan beraninya hanya memuat berita yang

² Seperti diberitakan dalam <http://regional.kompas.com/read/2015/07/17/09461561/Belasan.Kios.dan.Rumah.Warga.Hangus.Dibakar.Massa.Tak.Dikenal> diakses 25 Februari 2017

minim sumber berita atau hanya memakai sumber resmi, serta tanpa konfirmasi dari pihak yang dituduh melakukan pembakaran.

Selain faktor tipe liputan bias berita juga dapat terjadi karena faktor pemilihan sumber berita. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Tiffen yang menyatakan bahwa kecenderungan aliansi antara institusi media dengan saluran atau sumber informasi resmi akan melahirkan bias berita. Menurutnya aliansi semacam itu dapat memberikan kesempatan kepada pemerintah atau pihak birokrasi untuk mempengaruhi isi berita dan fokus berita (Prajiarto, 1993 : 23).

Konsekuensi dari ke dua hal tersebut jelas menimbulkan bias berita dan pada akhirnya dapat menimbulkan disinformasi pada khalayak yang membaca berita tersebut bahkan lebih jauh lagi dapat menimbulkan salah persepsi dan mempertajam konflik (*intensifier*) yang dapat menimbulkan dampak terjadinya eskalasi konflik sosial yang lebih luas.

Sejatinya untuk permasalahan konflik sosial yang sensitif semacam itu, penting bagi media massa *online* untuk melakukan verifikasi data dalam konteks mencari validitas dan akurasi

terhadap peristiwa tersebut agar berita yang disebar luaskan melalui jaringan internet tersebut tidak mempertajam konflik sosial yang ada. Namun media massa *online* seakan tidak peduli terhadap dampak atau efek berita yang ditimbulkannya terhadap khalayak yang membaca berita tersebut.

2. Keberpihakan Media Massa *online* Dalam Konflik Sosial Tolikara

Selain karena bias berita keberpihakan media dalam sebuah konflik juga dapat terjadi karena ideologi dari institusi media massa *online* tersebut, Hal ini berdasarkan pengamatan penulis terlihat dari pemberitaan tentang konflik Tolikara yang diberitakan oleh media Republika *online* yang dengan sengaja mengutip sumber berita bukan dari lokasi konflik sosial terjadi tapi justru dari sumber berita yang tidak mengetahui permasalahan sebenarnya dan cenderung mempertajam konflik. Sebagai contoh Republika.co.id dengan sengaja mengutip sumber berita dari Athian Ali Ketua Aliansi Nasional Anti Syi'ah (ANNAS) Athian Ali yang menyatakan adanya keterlibatan "Zionis Israel" dalam GIDI dan, dengan

demikian GIDI harus dibubarkan. Bahkan dalam pemberitaan yang lain terkait konflik Tolikara, Republika.co.id dengan berani memberitakan pendapat juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi karena kebencian dari masyarakat Papua dan bukan hanya jemaat GIDI terhadap umat Islam.

Menurut pengamatan penulis apa yang dilakukan oleh Republika.co.id ini merupakan keberpihakan institusi media massa online tersebut yang dikarenakan ideologi media massa *online* tersebut dalam bentuk *agenda setting* dan *framing* media atas peristiwa konflik sosial di Tolikara tersebut. Sebagai contoh salah satu berita yang dimuat dalam media *online* Republika.co.id pada tanggal 21 Juli 2015 di bawah ini :

Insiden Tolikara, Pemerintah Mengaburkan Fakta Sebenarnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sikap pemerintah dinilai belum tegas mengantisipasi kasus kekerasan yang dilakukan jemaat Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) terhadap umat Muslim di Tolikara, Papua. Bahkan pemerintah terkesan mengaburkan fakta yang sebenarnya

terjadi. Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) mengatakan pengaburan ini terjadi seputar penyerangan, pembakaran rumah, kios, hingga tempat ibadah umat Islam. Seolah-olah hanya dianggap sebagai perseteruan antar warga Tolikara. "Sikap pemerintah Indonesia terasa belum tegas mengantisipasi peristiwa ini bahkan terkesan mengaburkan pokok persoalan yang terjadi, seolah-olah hal ini hanya merupakan persoalan perseteruan antar warga dengan mengabaikan fakta yang sebenarnya," kata Ketua ANNAS, Athian Ali dalam siaran pers yang diterima Republika, Selasa (21/7). Menurut Athian, fakta sebenarnya adalah masalah sikap intoleransi yang ditunjukkan jemaat GIDI kepada umat Islam. Selain itu jelas terjadi pemaksaan dan kesewenang-wenangan yang berkaitan dengan agama dan peribadahan Muslim yang sejatinya bebas menjalankan dan dilindungi undang-undang³.

Bias pemberitaan yang dikarenakan ideologi institusi media

³ Sumber berita
<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/21/nru23c-insiden-tolikara-pemerintah-mengaburkan-fakta-sebenarnya> diakses pada 25 Februari 2017

tersebut, memang tidak dapat dihindarkan, karena media sebagai institusi pasti memiliki visi dan kepentingannya sendiri-sendiri yang berimplikasi pada sudut pandang (*point of view*) dalam bentuk *agenda setting* media tersebut dalam memberitakan suatu peristiwa konflik.

Namun demikian menurut pendapat penulis, dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, media *online* termasuk didalamnya para jurnalisnya dalam meliput sebuah peristiwa konflik seharusnya lebih mengedepankan pendekatan perdamaian atau memiliki visi atau cara pandang untuk meredakan sebuah konflik bukan malah sebaliknya malah terlibat dalam mempertajam konflik, seperti yang terjadi dalam beberapa pemberitaan media massa *online* terkait konflik sosial di Kabupaten Tolikara.

Apalagi jika dalam memberitakan sebuah peristiwa konflik sosial yang mengandung elemen identitas kelompok seperti identitas agama, suku dan ras tersebut, institusi media *online* hanya mementingkan aktualitas semata yang dikarenakan iklim kompetisi media *online* hari ini semakin ketat.

3. Mengejar Aktualitas Mengalahkan Faktualitas Berita

Peristiwa konflik sosial di Kabupaten Tolikara banyak yang diliput media massa *online* secara tergesa-gesa demi mengejar kecepatan penyampain pesan berita atau aktualitas kepada khalayak dan di sisi lain mengesampingkan faktualitas atau keakurasian berita tersebut.

Hal ini dapat dilihat dari pemberitaan yang dilakukan oleh media massa *online* Kompas.com dan MetroTVNews.com terkait peristiwa pembubaran shalat Idul Fitri dan pembakaran tempat kios serta masjid. Kedua media massa *online* ini dalam pemberitaannya hanya didasarkan pada pengamatan atau observasi jurnalisnya semata dan minim sumber berita. Kedua media *online* tersebut merupakan media massa *online* yang paling awal memberitakan konflik sosial di Kabupaten Tolikara. Keduanya menaikkan berita tersebut masing-masing pada jam 09.46 dan 09.59 WIB, atau sekitar 1 jam setelah peristiwa konflik sosial tersebut meletus.

Seperti sudah diungkapkan di awal tulisan, ke dua media massa *online* ini dalam pemberitaannya sangat minim sumber berita resmi, media

Kompas.com hanya menggunakan satu sumber berita resmi dari pihak kepolisian sedangkan media *MetroTVNews.com* tanpa menggunakan sumber berita manapun. Bahkan lebih parahnya liputan pemberitaan *MetroTVNews.com* tersebut juga tak memperlihatkan tanda-tanda ditulis oleh wartawan yang secara langsung berada di lapangan.

Apa yang terjadi tersebut menurut penulis menunjukkan bahwa pihak jurnalis maupun institusi media massa *online* tersebut dengan sengaja melakukan sebuah liputan berita terkait konflik sosial hanya untuk mengejar kecepatan penyampaian pesan berita atau mengejar aktualitas dan dengan sengaja mengesampingkan akurasi atau faktualitas sebuah berita.

Sehingga apa yang diberitakan hanya sekedar menyajikan terbakarnya sebuah rumah ibadah saja oleh sekelompok orang dan tidak berupaya untuk mengulas secara lebih komprehensif apa yang sebenarnya terjadi, mengapa peristiwa itu terjadi dan bagaimana hal itu bisa terjadi.

Menurut pendapat penulis apa yang dilakukan media massa *online* tersebut lebih semata-mata didorong oleh motif untuk berkompetisi dalam

menyampaikan pesan berita kepada khalayak dan mengejar jumlah *hit* (kunjungan) ke website mereka atau dengan kata lain lebih didorong oleh kepentingan bisnis atau ekonomi institusi media massa *online* tersebut dibandingkan kepentingan khalayak atau public.

Padahal semestinya media massa *online* tersebut dapat menjadi sumber acuan bagi khalayak dalam memaknai kasus atau peristiwa konflik sosial di Tolikara tersebut secara jernih dan tidak mudah teragitasi atau terhasut oleh pemberitaan yang tidak akurat dan tidak komprehensif terhadap peristiwa tersebut.

Media *online* yang pada awalnya hanya menjadi pencerita (*story teller*) peristiwa konflik Tolikara tersebut, pada akhirnya terjebak berperan menjadi mempertajam konflik (*intensifier*) bahkan pada akhirnya dapat menimbulkan kegaduhan publik.

Apalagi terkait peristiwa yang berlatar belakang isu agama, suku dan ras di tengah masyarakat majemuk sangatlah sensitif, seperti dalam masyarakat Indonesia yang masih menjadikan identitas agama, suku dan ras sebagai identitas diri dan kelompoknya.

4. Media Massa dan Konflik Sosial dalam Masyarakat Majemuk

Sudah menjadi suatu realita bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang multi etnis, multi agama dan juga multi budaya atau dengan kata lain masyarakat Indonesia merupakan sebuah masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk adalah suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri. Perbedaan-perbedaan sukubangsa, agama, adat dan kedaerahan seringkali disebut sebagai ciri masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk, suatu istilah yang mula-mula dikenalkan oleh Furnivall untuk menggambarkan masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda.

Keberadaan media massa dalam masyarakat majemuk jelas tidaklah mudah dan menghadapi tantangan tersendiri, tidak sekedar memberitakan sebuah peristiwa kepada khalayak tapi juga dituntut untuk memiliki peran dalam mengapresiasi kemajemukan masyarakat tersebut, terutama ketika memberitakan sebuah peristiwa konflik sosial.

Dalam masyarakat majemuk peran media baik media massa maupun media online dalam memberitakan sebuah peristiwa konflik sosial sangatlah krusial, apalagi konflik sosial yang melibatkan kekerasan dan berbasikan perbedaan etnis, agama atau latar belakang budaya tertentu.

Sebagaimana menurut Pawito yang menyatakan bahwa media massa dalam suatu masyarakat majemuk menghadapi beberapa tantangan baik dalam memberitakan atau menyampaikan informasi terkait sebuah peristiwa kepada khalayak maupun dalam konteks menciptakan sebuah *image* atau pencitraan (Pawito, 2008).

Sementara mengacu pada pendapat Gray dalam Pawito bahwa dalam konteks masyarakat majemuk ada tiga jenis karakter yang dapat dikembangkan oleh media massa ketika bekerja mengembangkan wacana, yakni : (1) karakter asimilasi; (2) karakter pluralis dan (3) karakter multikulturalisme (Pawito, 2008).

Karakter Asimilasi dapat diartikan bahwa media massa dalam mengembangkan wacana menekankan bahwa isu sensitif seperti etnis, budaya dan agama sebagai wilayah atau persoalan individu yang tidak

semestinya mendapatkan penonjolan di media massa. Menurut Gray isi media yang mempromosikan karakter asimilasi lebih menekankan pada kesamaan universalitas dan menghindari penonjolan perbedaan ras, warna kulit dan perbedaan lainnya.

Sementara karakter pluralis, berbanding terbalik dengan asimilasi, media massa yang mengembangkan wacana pluralis cenderung menonjolkan perbedaan yang ada terutama etnis sebagai basis dari perbedaan budaya yang ada. Intinya media massa tidak perlu menutupi perbedaan budaya yang dan semestinya memberikan apresiasi terhadap perbedaan tersebut dan memberikan ruang secara wajar bagi semua etnis dan budaya yang ada.

Sedangkan media massa dengan karakter wacana multikultural lebih menekankan pada menonjolkan konstruksi dan positioning nilai-nilai budaya berbagai kelompok etnis yang ada serta keberpihakan pada kelompok-kelompok marginal dibandingkan dengan kelompok yang memegang hegemoni.

Menurut Alo Liliweri konflik merupakan bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok karena mereka yang

terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan nilai atau kebutuhan. Konflik juga dapat diartikan hubungan pertentangan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran tertentu namun diliputi pemikiran, perasaan atau perbuatan yang tidak sejalan (Liliweri, 2005)

Dalam ranah publik, berbagai isu maupun permasalahan sosial seperti kekerasan dan konflik selalu menjadi perhatian publik yang seringkali disajikan oleh media-media dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Jika merujuk pada hasil studi yang dilakukan Juditha terkait peran media dalam pemberitaan konflik dan kekerasan menunjukkan bahwa hampir sebagian besar media terutama televisi menonjolkan sisi kekerasan dalam konflik. Bahkan yang lebih memperhatikan lagi dalam acara yang bersifat hiburan sekalipun pihak televisi tetap menyajikan unsur-unsur konflik kekerasan yang bernuansa Suku, Agama dan Ras (SARA) baik secara laten maupun manifest (Juditha, 2015).

Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa media massa di Indonesia memiliki kecenderungan untuk menonjolkan aspek kekerasan

dalam memberitakan suatu peristiwa konflik. Hal ini dapat diartikan media massa cenderung berperan tidak sekedar menjadi pencerita konflik tapi justru berperan untuk mempertajam konflik dengan sengaja menonjolkan sisi kekerasan.

Kesengajaan media untuk mempertajam konflik ini, dalam konteks masyarakat majemuk seperti Indonesia, sangatlah berbahaya karena dapat menimbulkan dampak meluasnya konflik sosial dan bahkan dapat menyebabkan meningkatnya eskalasi kekerasan akibat dampak dari pemberitaan oleh media.

Peran media massa baik cetak, elektronik terutama media online dalam meliput sebuah peristiwa konflik dalam konteks masyarakat majemuk sangatlah krusial. Apalagi di era informasi saat ini, ketika hampir semua orang dapat dengan cepat dapat mengakses informasi, media online merupakan sumber utama referensi khalayak untuk mengetahui dengan cepat sebuah peristiwa.

Ketidak akuratan dan kesengajaan menonjolkan unsur kekerasan dalam memberitakan sebuah peristiwa konflik sosial dapat

berdampak terjadinya segregasi sosial di tengah masyarakat majemuk.

Apalagi jika ketidak akuratan dan kesengajaan menonjolkan unsur kekerasan tersebut lebih didorong oleh motif mencari keuntungan bagi kepentingan para pemilik modal institusi media tersebut dan bukan atas nama kepentingan publik sebagaimana seharusnya peran media yang merepresentasikan kepentingan publik sebagai pilar keempat dalam konteks negara demokrasi (McQuail,2011).

Kepentingan para pemilik modal dalam industri media merupakan suatu realitas yang tidak dipungkiri pada saat ini di Indonesia yang seringkali menegaskan kepentingan publik. Hal ini dapat dilihat dalam studi yang dilakukan oleh Eryanto terkait dengan konsentrasi kepemilikan media dan ancaman ruang publik (2008). Eryanto berpendapat bahwa bahwa salah satu medium ruang publik yang penting adalah media massa, karena media memungkinkan khalayak untuk melihat apa yang terjadi di "luar" sana dan media massa dapat menjadi forum untuk merepresentasikan berbagai informasi dan ide-ide kepada khalayak terutama jika dikaitkan dengan masyarakat majemuk yang harus diberi ruang yang

wajar. Namun sayangnya, menurut Eryanto di Indonesia kepentingan pemilik modal dalam industri media sudah sampai pada taraf yang mengancam ruang publik (*public sphere*).

Media sebagai ruang publik (*public sphere*) dalam masyarakat majemuk sangatlah penting. Hal ini dikarenakan ruang publik atau *public sphere* merupakan sebuah ruang bagi otoritas publik dalam sistem demokrasi di mana negara maupun kepentingan modal tidak memiliki otoritas terhadap domain atau arena publik tersebut (Piliang, 2005).

Hal tersebut dapat diartikan bahwa media dalam kontes sistem demokrasi di Indonesia saat ini harus lebih mengutamakan kepentingan publik yang majemuk karena media merupakan ruang publik bukan ruang bagi kepentingan para pemilik modal institusi media yang hanya mengutamakan mengejar keuntungan semata dalam konteks memberitakan sebuah peristiwa konflik sosial, seperti pada kasus pemberitaan konflik Tolikara oleh media online.

Pada kasus pemberitaan konflik Tolikara dapat dikatakan institusi media *online* lebih mengutamakan aktualitas

demi mengejar kecepatan pemberitaan di era digital saat ini dan di sisi lain cenderung mengabaikan kepentingan publik. Institusi media *online* cenderung mengutamakan aktualitas dan mengabaikan faktualitas demi memperbanyak jumlah kunjungan (*hit*) ke laman mereka yang memiliki konsekuensi logis kepada keuntungan ekonomi bagi institusi media *online* tersebut dibandingkan dengan kemanfaatan bagi publik dalam konteks masyarakat majemuk.

Situasi dan kondisi yang terjadi ini, menurut penulis menunjukkan secara jelas bahwa media bukan merepresentasikan ruang publik, tapi lebih merepresentasikan kepentingan pemilik modal media *online* tersebut. Bahkan kalau situasi ini terus dibiarkan, akan dapat menegasikan kepentingan publik secara lebih luas dalam menerima atau mengakses informasi yang akurat dan komprehensif.

Berkaca pada hal tersebut, pihak pengelola dan juga jurnalis media massa *online* seharusnya mulai menyadari bahwa Negara Indonesia merupakan negara majemuk atau multi kultural yang memiliki aneka ragam suku, budaya, bahasa dan agama yang meskipun memiliki dasar Negara

Pancasila yang mengakui adanya perbedaan atau kemajemukan tersebut, tapi pada kenyataan kemajemukan dan perbedaan tersebut merupakan potensi yang dapat memicu konflik sosial. Artinya pihak pengelola dan jurnalis media massa online harus lebih mengutamakan proporsionalitas dalam pemberitaan, keakuratan dan juga cara pandang perdamaian atau jurnalisme perdamaian dalam memberitakan sebuah peristiwa konflik sosial.

Selain daripada itu, sudah saatnya media massa *online* di Indonesia mulai mengembangkan wacana multikultural dengan menekankan pada konstruksi dan positioning nilai-nilai budaya berbagai kelompok etnis yang ada dan lebih berpihak kepada kelompok yang termarginalkan atau menjadi korban dalam sebuah peristiwa konflik. Bukan sebaliknya, alih-alih meredakan konflik yang terjadi justru media *online* berperan mempertajam konflik.

Simpulan dan Saran

Berkaca dari paparan di muka tersebut, penulis berpendapat bahwa ketika sebuah media massa *online* memberitakan sebuah peristiwa konflik social cenderung hanya memberitakan

secara kurang komprehensif sehingga terjadi bias berita yang disebabkan oleh tipe liputan yang tidak berimbang dan lengkap (*coverage both side*). Sehingga berita yang dihasilkan dan ditayangkan di media massa *online* cenderung bersifat dangkal atau kurang mendalam, parsial, kurang proporsional serta sebagian besar cenderung hanya menonjolkan (saliensi) unsur kekerasan dari konflik sosial tersebut, misal beberapa orang yang menjadi korban, berapa rumah ibadah yang terbakar dan kurang menonjolkan pada aspek konteks masalah dan bagaimana solusi perdamaian atas permasalahan tersebut.

Akibat dari bias berita tersebut dapat memunculkan disinformasi dalam masyarakat dan dapat mempertajam konflik tersebut, apalagi dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia yang sensitif terkait isu agama, suku dan ras. Informasi yang tidak lengkap dalam pemberitaan akan menciptakan sebuah bias berita dan bias berita dapat memicu atau mempertajam eskalasi konflik social tersebut.

Selain dari tipe liputan pemberitaan dan pemilihan sumber berita yang menyebabkan terjadinya bias berita dan dapat mempertajam

sebuah konflik. Hal lain yang menurut penulis penting untuk disoroti adalah keberpihakan sebuah institusi media massa *online* secara ideologis.

Selain faktor bias berita dan juga ideologi institusi media massa dalam konteks pemberitaan peristiwa konflik social, hal yang tidak kalah pentingnya untuk dikritisi adalah kepentingan bisnis media untuk mengejar kecepatan berita demi mengejar jumlah kunjungan (*hit*) ke laman mereka. Sehingga menegasikan validitas dan akurasi sebuah berita yang menjadikan berita yang ditayangkan atau disajikan tidaklah komprehensif dan dapat memunculkan disinformasi di tengah khalayak yang dapat berlanjut pada penajaman dan perluasan sebuah konflik social, apalagi dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia.

Berpijak dari hal tersebut, dapat dikatakan jika sebuah pemberitaan terkait konflik sosial dalam sebuah masyarakat majemuk seperti Indonesia jika tidak tepat dalam memberitakannya akan dapat mempertajam dan memperluas eskalasi konflik social tersebut.

Selain itu, media massa *online* sudah semestinya mengutamakan akurasi atau faktualitas dibandingkan

dengan kecepatan atau aktualitas sebuah berita yang harus disampaikan kepada khalayak. Sehingga media massa *online* pada saat terlibat dalam memberitakan sebuah konflik dapat memberitakannya secara proporsional dan komprehensif atau menjadi pihak yang netral (*third party*). Akan tetapi walaupun pada akhirnya terlibat menjadi pencerita (*story teller*) sebuah konflik sosial tidak menjadi pihak yang mempertajam konflik (*intensifier*), tapi paling tidak bisa menjadi pihak yang meredakan konflik (*dimishier*).

Memang idealnya suatu berita tentang konflik sosial yang disampaikan oleh media massa *online* merupakan sebuah berita yang ditulis berdasarkan faktualitas dan tidak dicemari oleh kepentingan baik ideologi maupun bisnis yang berakibat mendistorsi fakta tersebut. Tetapi sayangnya, dalam prakteknya media massa *online* dalam membentakkan peristiwa konflik sosial sering kali tidak dapat bertindak atau bersikap sebagai pihak yang netral (*third party*).

Media massa *online* cenderung untuk terlibat sebagai pencerita konflik (*story teller*) dan cenderung untuk mengambil peran untuk mempertajam konflik (*intensifier*) dengan berbagai

alasan baik teknis peliputan berita, bisnis maupun ideologis.

Seringkali alasan teknis dalam peliputan berita yang dijadikan alasan dari pihak media massa ketika terjadi bias berita dan menyebabkan terjadinya disinformasi. Alasan teknis seperti penggunaan sumber berita yang berasal dari saluran informasi rutin seperti pernyataan dari pihak Kepolisian atau aparat pemerintah dalam kasus konflik sosial di Tolikara dapat menyebabkan terjadinya bias pemberitaan. Demikian pula penggunaan saluran informasi atau sumber berita informal atau pihak yang tidak terlibat langsung seperti juru Ketua forum Anti Syiah Indonesia juga dapat menyebabkan terjadinya bias berita yang bahkan dapat mempertajam konflik. Seharusnya media massa *online* mau mencari sumber dari laporan langsung (*first hand information*) melalui interview, observasi atau investigasi secara langsung.

Alasan teknis lainnya yang seringkali menjebak media massa *online* dalam memberitakan sebuah konflik adalah tipe liputan yang hanya mengandalkan tipe liputan satu sisi (*one-sided-coverage*) seperti yang dilakukan Kompas.com pada awal memberitakan peristiwa konflik Tolikara

tersebut. Idealnya dalam peliputan berita apapun termasuk berita terkait konflik sosial harus mengutamakan tipe liputan dua sisi (*coverage both side*).

Seharusnya alasan-alasan teknis tersebut dapat dieleminir atau dikurangi oleh pihak pengelola dan jurnalis media massa *online* terutama ketika memberitakan sebuah peristiwa konflik sosial sehingga dapat mencegah terjadinya bias berita yang dapat berujung pada disinformasi pada tingkat khalayak dan bahkan dapat mempertajam konflik.

Apalagi jika yang digunakan oleh media massa *online* adalah alasan ideology dalam arti bangunan ideologi yang digunakan merupakan bangunan ideologi yang cenderung eksklusif atau tertutup yang memandang ideologi lain diluar ideologi kelompok mereka adalah tidak benar atau salah. Bangunan ideologi media ini akan sangat berbahaya dalam konteks masyarakat majemuk seperti Indonesia yang akan dapat menciptakan segresi atau disintegrasi social yang semakin tajam.

Media massa online sudah seharusnya mulai membangun ideologi yang inklusif dalam membuat *agenda setting* dan *framing* media atas sebuah peristiwa konflik social. Sehingga media

massa online dapat lebih proposional dan komprehensif serta lebih sensitif dalam memberitakan peristiwa konflik social terutama yang bernuansa agama, suku dan ras baik sebagai pihak yang netral (*third party*) ataupun sebagai pihak pencerita (*story teller*) yang mengambil peran untuk meredakan atau mendamaikan konflik social tersebut.

Hal terakhir yang tidak kalah pentingnya menurut penulis adalah media massa online harus lebih berpijak pada kepentingan publik dalam konteks media sebagai ruang public (*public sphere*) dibandingkan kepentingan bisnis atau ekonomi semata. Artinya jangan hanya mengejar kecepatan penyampain berita kepada khalayak yang ujung-ujungnya mengejar banyaknya kunjungan (*hit*) yang berimplikasi pada keuntungan institusi media massa *online*.

Daftar Pustaka

Buku :

- Junaedi, Fajar. 2007. *Komunikasi Massa, Pengantar Teoritis*. Yogyakarta: Penerbit Santusta.
- Irawan, Prasetya. 2007. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta : Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia.

- Liliweri, Alo. 2005. *Prasangka dan Konflik. Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multi Kultur*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.
- McQuail, Dennis. 2011. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Penerbit Salemba.
- Prajarto, Nunung. 1993. *Media Berita Dalam Sebuah Konflik*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Vivian, John. 2008. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Jurnal :

- Eryanto, 2008, *Konsentrasi Kepemilikan Media dan Ancaman Ruang Publik*. Yogyakarta: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, Volume 12 Nomer 2.
- Juditha, Christiany, 2015. *Dilematis Media Dalam Pemberitaan Konflik dan Kekerasan*. Purwokerto: Jurnal Ilmu Komunikasi UNSOED Volume 11 Nomer 1.
- Pawito, 2008. *Media Massa dalam Masyarakat Pluralis*. Surakarta: Jurnal Ilmu Komunikasi UNS Volume 6 Nomer 1.

Media online :

- <http://tekno.kompas.com/read/2016/10/24/15064727/2016.pengguna.internet.di.indonesia.capai.132.juta>.
- <http://regional.kompas.com/read/2015/07/17/09461561/Belasan.Kios.dan.Rumah.Warga.Hangus.Dibakar.Massa.Tak.Dikenal>
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/21/nru23c-insiden-tolikara-pemerintah-mengaburkan-fakta-sebenarnya>